

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDKES PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

**Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia**

ABSTRACT

The type of data on research using secondary data is data that has been available to the government agencies involved in this study period of 2009-2014. Model analysis in this study and the multiple linear regression program used to process, classical assumption test data by using SPSS 22. The results of this analysis indicate that government spending education sector (X1) significantly affects the Human Development Index (Y) in East Kutai Regency. Government spending health sector (X2) no significantly affects on the Human Development index (Y) in East Kutai Regency. Showed Government spending health sector (X2) has not been sufficiently realized so well that it is not strong enough boost human development indxs in East Kutai Regency. The results of the research of government spending on education sector (X1) the dominant effect in improving human development indxs in East Kutai Regency.

Keywords: Government Sepending Education Sector, Development Secotr Health Expenditure, Human Development Index (HDI).

ABSTRAK

Jenis data pada penelitian menggunakan data sekunder adalah data yang telah tersedia untuk instansi pemerintah yang terlibat dalam masa studi 2009-2014. analisis model dalam penelitian ini dan Program regresi linier berganda digunakan untuk mengolah data uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 22. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sektor pengeluaran pemerintah pendidikan (X1) secara signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Sektor pengeluaran kesehatan pemerintah (X2) tidak signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah menunjukkan sektor pengeluaran kesehatan (X2) belum cukup menyadari dengan baik sehingga tidak cukup kuat mendongkrak indxs pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian dari belanja pemerintah di sektor pendidikan (X1) efek dominan dalam meningkatkan indxs pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Kata Kunci: Sepending Sektor pemerintah Pendidikan, Belanja Pembangunan Sektor Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu Negara, dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. (Widodo dkk., 2011).

Sekurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. (Widodo dkk., 2011).

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Timur, dimana Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, sektor Kesehatan dan (IPM) Kabupaten Kutai Timur (2009-2014).

| Tahun | Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rp) | Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rp) | IPM (%) |
|-------|---|---|---------|
| 2009 | 229.217.546.552,00 | 60.949.401.461,00 | 70,46 |
| 2010 | 328.981.001.671,00 | 84.453.640.949,00 | 70,64 |
| 2011 | 313.867.128.600,00 | 80.402.934.301,00 | 70,98 |
| 2012 | 450.780.752.908,00 | 79.373.847.104,00 | 72,05 |
| 2013 | 681.602.548.586,00 | 82.922.282.655,00 | 72,88 |
| 2014 | 764.876.595.254,00 | 95.396.880.420,00 | 72,97 |

Sumber: Bagian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah (BPKSD) dan Badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur 2009-2014.

Berdasarkan tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Kutai Timur terus meningkat namun (IPM) Kabupaten Kutai Timur masi rendah di Provinsi Kalimantan Timur. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur tahun 20014 sangat mengesankan karena mencapai angka 73,82% menempati urutan ke tiga sesudah Kota Balikpapan dan Kota bontang 77,53% dan 78,39%. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur tentunya ditunjang dengan tingginya variabel pembantu IPM yaitu; Angka harapan hidup sebesar 73,62%, tahun Angka melek huruf 13,17% angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,04% tahun, serta angka pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar Rp.11.019,-. Kab,berau, Kab,Kutai Barat, Penajam Pasir Utara dan

Kabupaten Kutai Timur sangat rendah di Provinsi Kalimantan Timur. Indeks Pembangunan Manusia ke empat kabupaten tersebut rendah dengan angka sebesar 72,26%, 68,91%, 68,60% dan 72,97%. Keempat kabupaten tersebut ditingkatkan lagi agar tercapai ke inginan menyejahterakan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang, yang seterusnya akan kita namakan negara berkembang saja, dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. (Mirza, 2012).

Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan (Suharto, 2010:73).

Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Manusia menurut Suharto, (2010: 80) yaitu sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3) \dots\dots\dots) \quad (\text{Suharto, 2010: 80})$$

Dimana :

X (1): Indeks harapan hidup

X (2): Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata)

X (3): Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X (i) = (X(i) - X(i) \text{ min}) / (X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min})$$

Dimana:

X (i) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)

X (i) maks : Nilai maksimum X (i)

X (i) min : Nilai minimum X (i)

Dalam Suharto,(2010: 80) Nilai maksimum dan minimum indikator X (i)

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi.

(IPM) dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014: 41).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. (Kuncoro, 2013).

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN; Merang Kahang

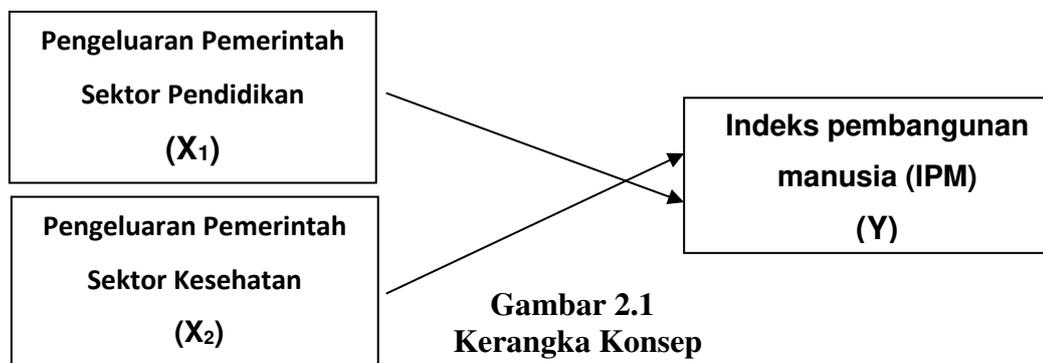
kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

Todaro & Smith, 2003, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (Rumate 2015).

Kerangka Konsep

Berdasarkan teori-teori yang mendukung penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Disusun kerangka konsep penelitian sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis dan memperoleh gambaran tentang Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Timur.

Alat analisis yang digunakan model regresi linear berganda memiliki variabel penduga lebih dari satu, yaitu X₁ sampai dengan X₂ Maka variabel dependen yang dipengaruhi variabel independen dinyatakan dalam variabel:

$$Y = f(X_1, X_2)$$

Sumber: (Gani:2015)

Dimana:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- X₁ = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
- X₂ = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

α = Konstanta

β_1 - β_2 = Koefisien Regresi Variabel Independen

ϵ = Error term Variabel pengganggu atau faktor-faktor di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel model di atas (kesalahan residual).

Kemudian ditransformasikan kedalam model regresi liner sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + \epsilon$$

Untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan Uji Regresi, uji Korelasi(R), uji R^2 , Uji Asumsi klasik, uji F (uji serentak) dan uji t (uji parsial), untuk mengetahui besaran pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil regresi yang telah dihitung dengan menggunakan SPSS maka ditemukan konstanta dengan nilai = 3.963 yang artinya bahwa pada saat Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia sebesar 3.963 persen.

Koefisien beta (X_1) bernilai 0,040 berarti bahwa setiap penambahan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan sebesar 1% akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Y) akan naik sebesar 0,040 persen dengan variabel bebas yang lain dari model regresi tetap.

Koefisien beta (X_2) bernilai 0,030 berarti bahwa setiap penambahan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan sebesar 1% akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Y) akan naik sebesar 0,340 persen dengan variabel bebas yang lain dari model regresi tetap.

Setelah mengetahui nilai konstanta, α , b_1 dan b_2 maka untuk mengukur keeratan hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur dengan cara menghitung koefisien korelasinya. Dalam program SPSS koefisien korelasi tersebut ditunjukkan dengan nilai R dari tabel di atas koefisien korelasi untuk permintaan beras sebesar ($R = 0,993$) angka ini menunjukkan hubungan yang sangat erat dari Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena mendekati satu.

Untuk mengukur derajat kecocokan atau ketepatan model pada penelitian ini variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_1), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X_2), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) di Kabupaten Kutai Timur dapat diperoleh dengan melihat R^2 . Adapun nilai R^2 dalam analisis ini adalah sebesar 0.987, hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen sebesar 98.7%. Sedangkan sisanya sebesar 1.3% (100%-98.7%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas distribusi data menyebutkan bahwa signifikan uji normalitas data dengan melihat kurva P -P Plot menunjukkan gambar titik-titik

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN; Merang Kahang

yang cenderung mengikuti garis kurva. Artinya, data ketiga variabel ini pada model penelitian terdistribusi dengan normal.

2. Uji Auto Korelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan nilai Durbin-Watson (DW). Berdasarkan tabel 4.6 diatas uji autokorelasi untuk menguji asumsi residual korelasi antara periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1) dengan nilai berada disekitar angka 2 maka akan menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Pada uji autokorelasi yang dilakukan menghasilkan nilai $-2 < 1,975 < 2$ atau berada disekitar -2 dan +2, maka tidak ada autokorelasi pada data yang digunakan.

3. Uji MultiKolinieritas

Pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai VIF. Ukuran nilai VIF jika dibawa 10 ($VIF < 10$) maka model tidak terjadi multikolinieritas. Nilai VIF pada kolom Collinearity Statistic adalah 2,576 (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan) dan 2,576 (pengeluaran pemerintah sektor kesehatan), dengan demikian nilai VIF pada semua variabel berada dibawah 10 ($VIF < 10$), yang artinya model tidak tergejala multikolinieritas.

4. Uji heterokedastisitas

Berdasarkan output Scatterplot Uji heterokedastisitas, bahwa jika titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak tergejala masalah heterokedastisitas.

Sedangkan untuk mengetahui hasil pengujian secara parsial atau pengujian hubungan antara variabel bebas secara individu dalam menerangkan variabel dependen .

Dari hasil output yang diperoleh dengan alat analisis spss, nilai F adalah sebesar 111,170 dimana lebih besar dari 4 dengan singnifikan 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yang berarti X1 (Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan) dan X2 (Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan) berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Y (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Kutai Timur.

Koefisien Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

untuk mengetahui hasil pengujian secara keseluruhan atau pengujian hubungan kedua variabel secara bersama – sama terhadap variabel Dari hasil output yang diperoleh dengan alat analisis spss, terlihat bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 11,226 menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil yang positif ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai signifikansi variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan sebesar 0,002 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berhubungan positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di Kabupaten Kutai Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa

hipotesis pertama (H1) diterima.

Koefisien Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Terlihat bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar $-2,667$ menunjukkan bahwa berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil yang negatif ini menunjukkan bahwa setiap pengurangan variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai signifikansi variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan sebesar $0,076$ dimana nilai ini lebih besar dari $0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak.

Berdasarkan Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki setandar koefisien $0,040$ dengan tingkat kepercayaan $11,226$ dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ dengan kata lain Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh dominan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H3) diterima.

PEMBAHASAN

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa, variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tri Mariani (2010) dan Devyanti Patta (2012). Dimana disebutkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil analisis sesuai dengan teori (Wahid, 2012). Menyatakan Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 APBN persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN; Merang Kahang

20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat bahwa dana yang dibutuhkan untuk peralatan dan perlengkapan pendidikan tidak sedikit sehingga anggaran dana yang dibutuhkan untuk sektor lain pada pendidikan belum dapat terealisasi. Meningkatkan pengadaan fasilitas bagi murid dan guru di Kabupaten Kutai Timur yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2010-2011. Diharapkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dapat lebih ditingkatkan agar mampu terealisasi kesemua bagian pada sektor pendidikan sehingga tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur dapat meningkat lebih baik dan melihat pertumbuhan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang lebih besar di Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan hasil secara persial bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki setandar koefisian 0,040 dengan tingkat kepercayaan 11,226 dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ dengan kata lain Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh dominan dalam meningkatkan Indeks Pembngunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa, variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini sesuai dengan teori dari hasil penelitian yang dilakukan sebelum oleh Astri Meylina (2013) dan Septiana M.M. Sanggелorang (2015) menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia. Hasil analisi ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro & Smith, 2003, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (Rumate 2015).

Perbandingan dana pada sektor pendidikan yang lebih kecil akan menyebabkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan kurang mampu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Karena kecilnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Bahwa

anggaran yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan belum terealisasi dengan baik hal ini terlihat karan sedikitnya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan Kabupaten Kutai Timur jadi untuk dinas kesehatan untuk turun langsung untuk meningkatkan pasilitas perlengkapan dan peralatan kesehatan supaya tingkat indeks pembngunan manusia Kabupaten Kutai Timur dapat meningkat lebih baik dan melihat pertumbuhan peningkatan indeks pembngunan manusia yang lebih besar.

Berdasarkan hasil secara persial bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang memiliki nilai standar koefisen $-0,030$ dengan tingkat kepercayaan $-2,667$ dan nilai signifikan $0,076 > 0,05$ dengan kata lain Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan belum mampu meningkatkan Indeks Pembngunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan maka, akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.
2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.
3. Dalam realitanya Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur, tidak dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Hal tersebut terjadi, karena pada periode tahun 2009-2014, anggaran pengeluaran pemerintah sektor kesehatan masih sangat kecil. Anggaran pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan, masih jauh dibawah setiap tahunnya selama priode pengamatan jika dibandingkan dengan alokasi pengeluaran ataupun belanja pemerintah lainnya, seperti pengeluaran pemerintah sektor paendidikan terus meningkat hal ini lah yang menyebabkan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh dominan dalam meningkatkan Indeks Pembngunan Manusia, di Kabupaten Kutai Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Widodo, dkk. (2011). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Vol. 1, No 1. Hal 25-42
- Astri, Meylina. (2013). *“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”*. Jurnal Pendidikan Ekonomi danBisnis. Vol.1. No. 1 Tahun 2012. ISSN:2302-2663

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN; Merang Kahang**

- Devyanti, Patta. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan periode 2001-2010*. Jurnal : Universitas Hasanudin.
- Gani, I. & A, S. 2015. *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik Untuk Penelitian*. Bidang Ekonomi dan Sosial.CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mirza, Danni S. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. Economics Development Analysis Jurnal.
- Mudrajat, Kuncoro. 2013. *Indikator Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Paramita, A. 2012. *Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Makassar 2000-2009*.
- Rafiqi, Sutikno, Wijanarko. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Seluruh Kabupaten Pulau Madura Tahun 2002-2011*. Madurua.
- Santoso, Singgih, 2012. *Panduan lengkap SPSS versi 20*. IKPI; Jakarta.
- Septiana M.M, Sanggelorang, dkk. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 02 –Edisi Juli 2015.
- Sugiyono, 2007. *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Todoro, M. P. & Semith, S. C 2003 *Economic Develomen, Eighth Edition*. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Usmaliadanti, S. 2011. *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia di Perovensi Jawa tengah Tahun 2007-2009*.
- Wahid, Bila. A. 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. Makassar.
- Winarti, A. 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.